

KONFLIK MUSLIM MADURA VS DAYAK DI SAMPIT SERTA DISKURSUS KAHARINGAN SEBAGAI KLAIM AGAMA

Muhyiddin Sholeh ^{1*}

¹ Pondok Pesantren Bina Al-Quran Biting Lumajang, Indonesia

*Corresponding author: muhyiddinsholeh@gmail.com

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan menjelaskan dinamika konflik muslim Madura dengan orang Dayak di Sampit serta menjelaskan klaim Kaharingan sebagai agama. Orang Madura yang mayoritas beragama Islam serta orang Dayak yang menganut system kepercayaan Kaharingan menjadi poros perhatian dalam tulisan ini. Dalam perjalanannya, Kaharingan sebagai system kepercayaan orang Dayak telah mendarah daging kemudian muncul tuntutan penglegalan Kaharingan sebagai agama resmi yang di akui Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa, *Pertama*: konflik Muslim Madura vs Dayak disebabkan banyak faktor. Diantara nya adalah faktor ekonomi, etnis, sosial, dan agama. *Kedua*, Pengaruh signifikan konflik Sampit terhadap tuntutan penglegalan Kaharingan sebagai agama.

Kata kunci: konflik sampit, kaharingan, agama

Pendahuluan

Toleransi dan menghormati antar umat beragama sudah mendarah daging dalam diri orang Kaharingan. Kesan itu yang di dapat Yohannes Mauritz (seorang peneliti yang mencoba mengadakan study terhadap orang-orang Kaharingan di desa Rubung Buyung Sampit Kalimantan Tengah) ketika pertama kali mengunjungi orang-orang Kaharingan.¹ Hasil penelitian yang ia tulis dengan judul “*Agama Kaharingan Bukan Budaya*” *Catatan Proses Inklusif Agama Lokal Melalui Revitalisasi Nilai : Studi Orang-Orang Kaharingan Di Desa Rubung Buyung Sampit Kalimantan Tengah*, kemudian dicetak dan dikumpulkan dalam satu buku dengan peneliti yang lain dengan judul “*Intoleransi, revitalisasi tradisi dan tantangan kebinekaan Indonesia*”, menambah daftar panjang kegelisahan banyak peneliti akan dikotomi agama resmi negara dan sistem kepercayaan lokal.

Agama Kaharingan, bagi pemerintah masih dianggap sebagai sistem kepercayaan. Ia tak ubahnya seperti budaya yang ruang geraknya tak seluas dan seluas agama resmi negara. Hal ini memicu banyak nya anggota keluarga Kaharingan beralih agama resmi negara yang nota bene agama pendatang di Rebung Buyung Sampit Kalimantan Tengah. Hal ini akan menimbulkan konflik yang menjadi tantangan besar dalam internal kekerabatan orang Kaharingan.²

Di samping itu, ada tantangan dari kemajuan jaman yang begitu pesat serta para pendatang yang terus membanjiri Kota Sampit, sehingga dominasi orang Kaharingan berkurang dan mereka terpojok dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai kaum pendatang. Tak heran, hal itu menjadi gesakan dan api konflik yang terus membesar. Pada puncaknya, tragedi Sampit meletus antara Muslim Madura dan Dayak tahun 2001.³ Konflik ini pula menjadi salah satu pemicu intens nya

¹ Lihat Yohannes Mauritz, “*Agama Kaharingan Bukan Budaya*” *Catatan Proses Inklusif Agama Lokal Melalui Revitalisasi Nilai : Studi Orang-Orang Kaharingan Di Desa Rubung Buyung Sampit Kalimantan Tengah* dalam “*Intoleransi, revitalisasi tradisi dan tantangan kebinekaan Indonesia*” Ahmad Suaedy (Ed) (Depok : Abdurrahman Wahid Center – Universitas Indonesia, 2017), 128

² Ibid

³ Lebih Jelas nya lihat Rusnani Anwar, “ *Mengenang Kerusuhan Sampit*” dalam https://www.kompasiana.com/rusnaniawar/mengenang-kerusuhan-sampit-2001_55007023a333114a73510cc4 (Diakses 20 Desember 2021)

tuntutan para pengikut Kaharingan kepada Negara untuk melegalkan Kaharingan sebagai agama.

Mengenal Agama Kaharingan.

Kaharingan, terlepas ia agama atau budaya⁴ merupakan kepercayaan tradisional suku Dayak di Kalimantan. Kata “Kaharingan” di adopsi dari bahasa *Sangiang*, Bahasa yang dipakai yang dipakai dalam ritual-ritual orang Dayak Ngaju, yang berarti “kehidupan”.⁵

Kaharingan pada mulanya nama agama masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Menurut masyarakat Dayak Ngaju, Kaharingan tidak dimulai sejak zaman tertentu. Kaharingan telah ada sejak awal penciptaan, sejak *Ranying Hatalla Langit* menciptakan alam semesta. Inilah agama leluhur masyarakat Dayak Ngaju, yang telah ada sejak dua manusia laki-laki dan satu perempuan pertama diciptakan, yaitu *Manyamei Tunggul Garing Janjabunan Laut* dan *Kameloh Putak Bulau Janjulen Karangan Kamasan Tambon*⁶. Hal ini tentu berbeda dengan kepercayaan dari agama Islam, Yahudi dan Kristen yang percaya bahwa nenek moyang manusia dari Adam dan Hawa.⁷

Oleh karena itu, agama-agama resmi negara yang merupakan pendatang, seperti Islam, Kristen, Hindu merupakan agama yang masih muda. Dengan datangnya agama muda itu, menyebabkan Kaharingan dianggap disebut sebagai agama *Helo* (agama lama), *Agama Huran* (agama Kuno), atau *Agama Tato Hiang* (agama nenek-moyang).⁸

Kaharingan mempunyai tempat ibadah yang dinamakan *Balai Basarab*⁹ atau Balai Kaharingan. Kitab suci agama mereka adalah Panaturan dan buku-buku agama lain, seperti *Talatab Basarab*

⁴ Yohannes Mauritz menganggap Kaharingan adalah agama, ia berteriak dengan lantang : “agama Kaharingan bukan budaya”. Lihat Yohannes Mauritz, “*Agama Kaharingan Bukan Budaya*”...128

⁵ Ibid, 144

⁶ Marko Mahin, *Kaharingan : Dinamika Agama Dayak di Kalimantan Tengah* (Disertasi Doktorat Universitas Indonesia Depok, 2009), 180

⁷ Ibid, 187

⁸ Ibid, 180. Lihat Pula Yohannes Mauritz, “*Agama Kaharingan Bukan Budaya*”..144

⁹ Ibid, 142

(Kumpulan Doa), *Tawar* (petunjuk tata cara meminta pertolongan Tuhan dengan upacara menabur beras), dan sebagainya.

Salah satu ibadah dalam Agama Kaharingan adalah *Ibadah Basarab* yang diartikan “*menyerahkan segala kepasrahan kita kepada Tuhan Ranying Hatalla*” membentuk lingkaran mengelilingi *sangku* (tambak raja) yang diletakkan di atas meja dan simbol pohon batang haring (pohon kehidupan) yang diujungnya terdapat burung Anggang (Enggang) masing-masing umat mengumpulkan uang di tempat dupa sebagai simbol untuk memberikan rezeki dari uang yang mereka dapatkan selama seminggu untuk kegiatan agama.

Dinamika yang berbeda turut menghiasi perjalanan agama Kaharingan, pada masa Belanda dan orang-orang Barat menganggap orang Dayak tidak memiliki agama. Mereka dianggap sebagai kafir, *Heiden*, agama para pengayau. Orang Dayak terkaenal senter dengan tradisi “Ngayau” yaitu tradisi memotong kepala manusia.¹⁰

Pada zaman Jepang, Kaharingan tampaknya mendapat penghargaan dan kedudukan yang terhormat. Penguasa militer Jepang menyatakan bahwa Agama Kaharingan ada kaitan dan kemiripan dengan agama Shinto¹¹. Hal itu dilakukan Jepang untuk meraih simpati dari orang-orang Banjarmasin¹²

Setelah kemerdekaan, agama Kaharingan tidak diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Pemerintah Indonesia melihat Kaharingan hanya sebagai “agama suku” atau aliran kepercayaan atau adat atau kebudayaan¹³. Hal itu dipertegas pada masa Orde Baru yang hanya mengakui 5 agama sebagai agama resmi, yaitu : Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Jendral Amir Machmud tahun 1987 diterangkan petunjuk pengisian kolom agama yang bukan 5 agama yang diakui tersebut dengan tanda strip (-).¹⁴

¹⁰ Ibid, 144

¹¹ Marko Mahin, *Kaharingan : Dinamika Agama Dayak...*, 184. Sebagaimana dikutip oleh Yohannes Mauritz, “*Agama Kaharingan Bukan Budaya*”..144

¹² Ibid

¹³ Marko Mahin, *Kaharingan : Dinamika Agama Dayak...*, 184-185

¹⁴ Yohannes Mauritz, “*Agama Kaharingan Bukan Budaya*”...145

Pada masa ini, ada dua hal yang ditakuti. Pertama : agama pada masa orde baru menjadi pembeda dengan orang yang tidak beragama. Pembeda ini menjadi senjata ideology Orde Baru untuk berhdapan dengan lawan politiknya, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap “tidak bertuhan”. Jika demikian, Kaharingan bisa dibumi hanguskan karena dianggap bukan agama yang tak bertuhan¹⁵. Kedua, dengan label “belum beragama” atau “tidak bertuhan”, masyarakat Kaharingan akan menjadi target proselitasasi baik oleh Pekabar Injil Kristen maupun pendakwah Islam. Apalagi pada 2 Januari 1979, keluar Surat Keputusan Bersama Menti Agama Dan Menti Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang pelarangan penyebaran agama terhadap kelompok atau orang yang memeluk agama lain.¹⁶

Para tokoh Kaharingan pada waktu itu langsung mencarikan jalan keluar. PEMDA memberi 2 opsi, yaitu menjadi aliran kepercayaan atau bergabung dengan salah satu agama yang diakui pemerintah. Lewis KDR pada awal 1980-an memilih mengupayakan bergabung dengan agama Hindu. Setelah dialog yang panjang dengan pimpinan Parisadha Hindu Dharma Indonesia membuahkan hasil yaitu bergabungnya Kaharingan dengan agama Hindu, sehingga ada istilahnya Hindu Kaharingan. Dengan begitu, orang-orang Kaharingan bisa mengisi kolom agama di KTP dengan nama Hindu Kaharingan.¹⁷

Salah satu proses penggabungan dengan agama Hindu, dibentuklah Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MBAHK). Struktur MBAHK berstruktur dari tingkat pusat di Kaliman Tengah, kabupaten, kecamatan dan desa. Di sisi lain, muncul organisasi yang kontra penggabungan dengan Hindu, yaitu Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAKRI) yang didirikan pada 17 Agustus 2001. MAKRI menganggap Kaharingan berbeda dengan Hindu.¹⁸

Sampit Berdarah 2001

Kota Sampit menjadi tujuan migrasi, sekurang-kurangnya Sampit memiliki komposisi etnis yang beragam antara lain Dayak,

¹⁵ Marko Mahin, *Kaharingan : Dinamika Agama Dayak...*,212

¹⁶ Ibid, 213

¹⁷ Yohannes Mauritz, “*Agama Kaharingan Bukan Budaya*”..145-146

¹⁸ Ibid, 147

Banjar, Madura, Jawa, Bugis, Nusa Tenggara, Bali dan China.¹⁹ Para pendatang dengan etos kerja dan semangat juang yang tinggi, mampu membawa pengaruh serta menggapai kemajuan yang amat pesat. Hal ini, menimbulkan sikap iri dalam hati penduduk asli.

Orang Madura dikenal dengan keuletan serta keberaniannya. Ditambah lagi, mereka tidak pilih-pilih pekerjaan, meskipun hanya menjadi kuli pada perkebunan sawit. Lambat laun, mereka sukses dan kaya raya, sehingga menarik gelombang migrasi besar dari Madura ke Kalimantan (*Jaba Daja*). Mereka memiliki orientasi keluar/ merantau (*out ward oriented*) disebabkan tanah Madura yang gersang. Kemudian mereka temukan Kalimantan adalah tanah yang cocok untuk membuka lahan karena kesuburannya. Ditambah lagi ada kepercayaan orang Madura, bahwa sejatinya lahan kosong yang tidak dimiliki siapapun itu milik Allah berhak untuk dikelola.²⁰

Tragedi Sampit, lebih kepada persoalan kerusuhan etnis daripada konflik antar umat beragama. Kerusuhan bermula dari konflik Dayak-Madura di Sambas Kalimantan Barat pada tahun 1997, kemudian meluas dan meruncing sampai pada puncaknya di Sampit tahun 2001. Tragedi ini disebut ‘kerusuhan besar’ bukan hanya dari jumlah korban dari kedua belah pihak, tetapi juga telah terjadi pemenggalan kepala (*ngayau*) orang-orang Madura dan mayat-mayat tanpa kepala itu bertebaran di jalan-jalan utama kota Sampit.²¹

Ada banyak pendapat tentang sebab-sebab konflik di Sampit, hal ini tak terlepas dari sudut pandang yang berbeda. Bagi orang Dayak, pendatang Madura bersikap semena-mena dan arogan, bahkan ada tuduhan criminal pencurian motor yang dilakukan orang Madura.²² Bagi orang Madura, konflik terjadi karena sikap iri dari orang Dayak melihat kemajuan ekonomi orang Madura di tanah kelahiran mereka.²³

¹⁹ Ibid, 135

²⁰ Ruslikan, “Konflik Dayak-Madura di Kalimantan Tengah: Melacak Akar Masalah dan Tawaran Solusi,” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Tahun XIV, Nomor 4, (Oktober 2001), 6

²¹ Yohannes Mauritz, “*Agama Kabaringan Bukan Budaya*” 137

²² Ibid, 138

²³ Ruslikan, “Konflik Dayak-Madura di Kalimantan Tengah...5

Terlepas dari sebab-sebab konflik, keterhubungan antara konflik Sampit dengan agama Kaharingan bisa kita lihat pasca 2001. Di mana babak baru dimulai, persoalannya bukan lagi persoalan hubungan antar etnis, tetapi sudah merambah pada hubungan antar umat beragama. Orang-orang Kaharingan yang tinggal di desa Rubung Buyung mulai menghadapi kehadiran agama-agama pendatang yaitu Islam dan Kristen yang semakin banyak masuk ke desa mereka.²⁴

Dengan demikian, perpindahan agama di kalangan anak-anak Kaharingan tidak bisa dihindarkan. Hal itu, tentu menjadi kekhawatiran dari orang-orang tua Kaharingan.

Dikotomi Agama dan Budaya.

Agama dan budaya saling berkaitan satu sama lain namun berbeda. Banyak orang yang salah mengartikan tentang kedua hal ini dalam kehidupan. Terkadang Agama melahirkan kebudayaan. Pun sebaliknya, budaya menjadi penentu embrional munculnya agama tertentu.

Dalam proses penyebaran agama, masyarakat biasanya menerima minimal tiga bentuk penilaian terhadap agama. *Pertama*, agama diterima sepenuhnya, *kedua*, agama diterima sebagian sebagian yang disesuaikan dengan kebutuhan seseorang atau kelompok orang. *Ketiga*, agama itu ditolak sama sekali. Ketiga sikap penerimaan itu juga terjadi di Indonesia.

Pada umumnya agama yang masuk akan mengalami proses penyesuaian dengan budaya yang telah ada. Ada kompromi nilai atau symbol antar agama yang masuk dengan kebudayaan asal, yang menghasilkan bentuk baru dan berbeda dengan agama atau budaya asal .

Dengan demikian, suatu agama yang masuk pada msyarakat tidak pernah bisa ditemukan sebagaimana bentuk aslinya secara utuh, selalu ada pelenturan nilai nilai (fluiditas). Pelenturan tersebut membuat symbol budaya bermetamorfosis dalam maknanya yang baru. Pelenturan ini terjadi karena manusia dan masyarakat bukan

²⁴ Yohannes Mauritz, “*Agama Kaharingan Bukan Budaya*”..140

mesin fotocopy yang bisa dan mau menjiplak yang diterimanya, secara sadar dan tidak sadar.²⁵

Bagi orang-orang Kaharingan, mereka membedakan antara budaya dengan agama²⁶. Dengan adanya perpindahan agama, maka kekhawatiran tidak lagi menjalankan upacara dan ritual adat menjadi nyata. Sebabnya upacara dan ritual adat Dayak Ngaju tak memiliki perbedaan jelas dengan ritual agama Kaharingan. Maka, bagi anak-anak yang telah beralih agama dari Kaharingan tak mau menjalankan upacara adat sebab dengan menjalankannya, berarti menjalankan ritual agama lain, dan itu berdosa.²⁷

Salah satu upacara yang mereka lakukan adalah *tiwab*, yaitu upacara kematian. Upacara ini sendiri dilakukan dengan mengumpulkan binatang ternak yang ditempatkan di pusat lingkaran yang terdiri dari manusia-manusia. Kemudian gendang ditabuh dan orang-orang yang membuat lingkaran tadi mulai menari sambil bergerak memutar. Lalu dalam satu sesi, para keluarga yang meninggal itu menombak hewan-hewan ternak tersebut. Setelah binatangnya mati, kemudian mereka akan bergerak memutar lagi. Biasanya upacara ini dilakukan oleh banyak orang sekaligus. Hal itu dirasa lebih ringan daripada menggelar *Tiwab* sendiri yang memakan biaya yang banyak.²⁸

Untuk mengakomodir sanak family mereka yang pindah agama, untuk tetap ikut acara ritual adat, maka mereka membedakan antara adat dan agama. Mereka menyatakan dengan lantang : “ agama Kaharingan bukan budaya” yang awalnya dipakai untuk menghalau anggapan Kaharingan sebagai aliran kepercayaan (yang tentu membahayakan eksistensi Kaharingan pada masa Orde Baru), kini dipakai untuk mengakomodir kerabat mereka yang berbeda agama guna mempertahankan hubungan kekerabatan.²⁹

Meski ada pembedaan antara adat dan agama Kaharingan, hingga kini masih terdapat Tarik ulur apa saja yang dapat dikategorikan sebagai agama dan adat.

²⁵ Dadang Kahmad , *Sosiologi Agama, potret Agama dalam Dinamika konflik, Pluralisme dan Modernitas*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

²⁶ Yohannes Mauritz, “*Agama Kaharingan Bukan Budaya*”...167

²⁷ Ibid, 153

²⁸ Ibid, 154

²⁹ Ibid, 166

Revitalisasi Nilai dan Agama Lokal yang Inklusif

Yohannes Mauritz menawarkan adanya revitalisasi nilai dalam menanggapi permasalahan di atas, sehingga dalam memandang agama Kaharingan, kita tak melihat dari sisi luar nya saja. Tetapi melihat dari nilai-nilai luhur yang ada di dalam agama Kaharingan, yang tentu diajarkan pula oleh agama-agama yang lain. Dalam hal upacara suatu misal, pemisahan antara Kaharingan sebagai agama dengan upacara sebagai budaya, merupakan bentuk revitalisasi nilai, dimana mempertahankan kekerabatan meski beda agama jauh lebih penting daripada mempertahankan tatanan kultur agama Kaharingan. Mengutamakan kehidupan bersama sebagai satu kerabat dan menerima tinggal di dalam satu tempat yang sama (rumah *betang*) sekalipun berlatang belakang agama berbeda adalah wujud dari revitalisasi nilai.³⁰

Di samping itu, sikap inklusif dengan membuka akses dan terbuka dengan dunia luar menjadi hal yang wajib dilakukan oleh agama Kaharingan. Hal itu akan memupuk rasa menghormati perbedaan sehingga toleransi menjadi kedirian mereka.

Sebagai tambahan, pemerintah di dalam mengemban amanah UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menjamin semua masyarakat melaksanakan kewajibannya beribadah sesuai kepercayaannya, harus mereview lagi tentang konsep agama resmi dan agama lokal. Konsep agama yang Monotheistik, mempunyai kitab suci, mempunyai nabi/penyebarnya dan mempunyai komunitas internasional. Sehingga para penganut agama-agama lokal, termasuk Kaharingan bisa mendapatkan hak-hak nya secara penuh sebagaimana didapatkan oleh para penganut agama-agama resmi negara.

Pemenuhan hak untuk memeluk kepercayaan seperti yang dinyatakan oleh Bimantara Adjie Wardhana Laksmi Amrita, tidak hanya sebatas pada kebebasan untuk menganut kepercayaan tersebut. Sama halnya dengan agama, Kaharingan juga memiliki aspek-aspek yang merupakan bagian dari manifestasi dari memeluk dan meyakini Kaharingan. Manifestasi tersebut oleh penulis dibagi kedalam 3 (tiga) topik permasalahan yaitu manifestasi dalam beribadah, pencatatan

³⁰ Ibid, 168

administrasi (kependudukan dan pernikahan) serta hak untuk mendapatkan pendidikan terkait kepercayaan Kaharingan.

Pertama, Ibadah merupakan hal utama yang merupakan bagian dari manifestasi hak untuk memeluk kepercayaan. Ibadah dalam Kaharingan merupakan bagian dari menghormati adanya *Ning Bhatara Langit* dan *Pasarupa*, sekaligus mengaskan adanya hubungan diantara ketiga elemen. Penganut Kaharingan melaksanakan ibadah di Balai Basarah.

Kedua, Hak pencatatan administrasi berkaitan dengan prosedur pencatatan administrasi kependudukan, serta perkawinan yang dilaksanakan oleh penganut Kaharingan. Pencatatan administrasi kependudukan dalam KTP Elektronik (E-KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memasukkan Agama Hindu ke dalam kolom agama para penganut Kaharingan. Mengingat ada pro-kontra peleburan Agama Hindu-Kaharingan, perlu dipikirkan jalan keluar bagi yang kontra.

Ketiga, Penyebaran ajaran Kaharingan dalam hal pendidikan di tingkat sekolah formal merupakan permasalahan terakhir dari manifestasi dalam hal pemenuhan hak untuk memeluk kepercayaan. Situasi di lapangan yang terlihat sangat mengejutkan. Penyebaran pendidikan ajaran Kaharingan masih dipandang sebelah mata oleh beberapa pihak, sehingga hal ini yang penulis rasa sangat perlu untuk dibahas.³¹

Penutup

Konflik Muslim Madura dengan Orang Dayak Kaharingan menjadi salah satu konflik berdarah yang menakutkan. Orang Madura sebagai pendatang dan menjadi migran di Kalimantan lambat laun menunjukkan kesuksesan yang luar biasa. Pada gilirannya, membuat penduduk Dayak yang merupakan warga asli Kalimantan merasa tersingkirkan dan terancam eksistensinya. Hal ini diperparah dengan perpindahan para penganut Kaharingan dan eksodus besar-besaran ke agama-agama lain, termasuk Islam.

³¹ Di sarikan dari Bimantara Adjie Wardhana Laksmi Amrita, *Pemenuhan Hak Untuk Memeluk Kepercayaan Bagi Penganut Kepercayaan Kaharingan : Studi Pada Masyarakat Hukum Adat Balai Kÿnu, Kalimantan Selatan* (Naskah Publikasi – Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016), 15-19

Suku Dayak yang menganut Kaharingan, meskipun jumlahnya semakin sedikit, pasca konflik Sampit, lewat tokoh-tokoh Kaharingan, mereka tetap berjuang demi diakuiinya Kaharingan sebagai agama resmi di Indonesia. Sebagai sebuah kepercayaan adat tentu harus dilakukan penelitian lebih agar Kaharingan dapat dikategorikan sebagai agama dan bukan sebagai bagian budaya dayak saja. Ada yang mengupayakan lewat peleburan dengan agama Hindu mengingat ada banyak kemiripan antara keduanya. Adapula yang mengupayakan dengan menyatakan Kaharinga adalah agama tersendiri yang harus diakui.

Saat ini, bagi pemeluk kepercayaan adat ini, yang terpenting adalah pengakuan negara atas eksistensi agama mereka sehingga hak-hak asasi mereka terlayani dan terlindungi oleh Negara misal dalam catatan sipil, akses pendidikan, bantuan dana hingga pendirian tempat ibadah.

Daftar Pustaka

Amrita, Bimantara Adjie Wardhana Laksmi. *Pemenuhan Hak Untuk Memeluk Kepercayaan Bagi Penganut Kepercayaan Kaharingan : Studi Pada Masyarakat Hukum Adat Balai Kiyu, Kalimantan Selatan*. Naskah Publikasi – Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.

Anwar, Rusnani “ *Mengenang Kerusuban Sampit*” dalam https://www.kompasiana.com/rusnianianwar/mengenang-kerusuban-sampit-2001_55007023a333114a73510cc4 (Diakses 20 Desember 2021)

Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama, potret Agama dalam Dinamika konflik, Pluralisme dan Modernitas*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Mauritz, Yohannes. “*Agama Kaharingan Bukan Budaya*” *Catatan Proses Inklusif Agama Lokal Melalui Revitalisasi Nilai : Studi Orang-Orang Kaharingan Di Desa Rubung Buyung Sampit Kalimantan Tengah* dalam “*Intoleransi, revitalisasi tradisi dan tantangan kebinekaan Indonesia*” Ahmad Suaedy (Ed). Depok : Abdurrahman Wahid Center – Universitas Indonesia, 2017.

Mahin, Marko. *Kabaringan : Dinamika Agama Dayak di Kalimantan Tengah*. Disertasi Doktor Universitas Indonesia Depok, 2009.

Ruslikan, “Konflik Dayak-Madura di Kalimantan Tengah: Melacak Akar Masalah dan Tawaran Solusi,” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Tahun XIV, Nomor 4, Oktober 2001.